KINERJA SUKU DINAS SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA

Oleh

SITI NURMALISA

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRAK

Berdasarkan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersurat bahwa Negara berkewajiban “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, rumusan tersebut berarti bahwa penyelenggaraan Negara mengusahakan agar setiap warga Negara menjadi cerdas dan sejahtera, yaitu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi baik oleh diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial oleh pemerintah pusat untuk menekan angka pengemis dan gelandangan, diharapkan untuk dapat meminimalisir jumlah dari pengemis dan gelandangan di DKI Jakarta. Maka dari itu dilihat dari Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Kinerja dari suku dinas sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan ternyata belum optimal karena lima dimensi kinerja yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas, kurang tercapai dalam meminimalisir jumlah dari pengemis dan gelandangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja suku dinas sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan dalam rangka mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan yang ada di DKI Jakarta. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif di Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Informan yang dipilih seperti Kepala Sudin Sosial Dan Kepala Panti Sosial serta pengemis dan gelandangan, pengamatan langsung di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja suku dinas sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan di Kota Administrasi Jakarta Barat ini memang kurang optimal dikarenakan kelima dimensi kinerja tersebut.

Kata kunci : Kinerja, Kemiskinan, Kesejahteraan Rakyat

A. Latar Belakang

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan suatu kebutuhan bagi upaya penyelesaian masalah kehidupan masyarakat mulai dari masalah kemiskinan sampai masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal ini maka terbentuklah dua

kelompok yang saling berkaitan yaitu pemerintah dan masyarakat. Keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat terbangun atas kontrak sosial. Implikasi dari kontrak sosial adalah pemerintah dijadikan personafikasi Negara yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat dengan memobilisasi segenap sumber daya¹. Berdasarkan inilah fungsi pemerintahan sebagai seni pengelolaan kekuasaan dibutuhkan dalam sebuah Negara.

Fungsi pemerintah berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Menurut Rasyid dalam Labolo, fungsi pemerintahan ada 4 (empat) yaitu: “Pelayanan publik (public service), pengaturan (regulation), pembangunan (development) dan pemberdayaan (empowerment)”².

Sebagaimana disebutkan di atas, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan social yang difokuskan menekan angka pengemis dan gelandangan. Hal ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang kompleks dimana untuk memenuhi harkatnya sebagai manusia mereka harus hidup sejahtera, hal ini dilihat dari kelayakan hidupnya. Tetapi pada kenyataannya banyak daerah-daerah di Indonesia yang tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya sendiri dan disamping itu masih ada sebagian daerah yang tertinggal. Sebagian daerah tersebut memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah.

Dalam hal ini pembangunan yang terlalu mengutamakan modernisasi industri dan terlalu menfokuskan sector industri mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan baik itu tingkat kota maupun desa. Dengan situasi dan kondisi yang seperti ini mendorong lajunya urbanisasi industri dan tingginya tingkat urbanisasi mengakibatkan berbagai permasalahan di kota. Dalam hal ini ketika pelayanan kota mengalami kerusakan atau kegagalan maka akan mengakibatkan kemiskinan kota karena tidak tercapainya pelayanan bagi masyarakat miskin dan hal ini berujung pada timbulnya pemukiman kumuh bagi penyandang masalah kesejahteraan social yaitu pengemis dan gelandangan

¹ Labolo, Muhadam. 2012. *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal*. Jakarta: Kuba Ilmu. Hlm. 29-31

² *Ibid.* Hlm. 31

Pengemis dan gelandangan ini rata-rata berasal dari urban yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan mempunyai keterampilan yang minim. Latar belakang mereka menjadi Pengemis dan gelandangan adalah faktor Ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan keterampilan yang minim, dalam hal ini mereka ke Jakarta dengan iming-iming ekonomi mereka akan menjadi lebih baik. Tidak semua dari pengemis dan gelandangan ini berasal dari keluarga yang miskin, tetapi sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga yang memang benar-benar keluarga miskin. Rata-rata dari mereka yang datang ke Jakarta karena mereka tergiur dengan penghasilan yang besar tanpa membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang layak.

Permasalahan di atas menggambarkan belum optimalnya kinerja dari dinas sosial dalam penanganan pengemis dan gelandangan.

B. Perumusan Masalah

Payung hukum yang lemah dalam penanganan pengemis dan gelandangan ini mengakibatkan permasalahan pengemis dan gelandangan di DKI Jakarta tidak akan ada habisnya. Untuk mengatasi masalah pengemis dan gelandangan Suku Dinas Sosial memiliki program yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengurangi angka kemiskinan di Jakarta barat sendiri. Namun hal ini juga belum dapat mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Sehingga dalam hal ini dilihat dari Kinerja Suku Dinas Sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan di kota administrasi Jakarta barat provinsi DKI Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja Suku Dinas Sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan di kota administrasi Jakarta barat provinsi DKI Jakarta dalam upaya meminimalisir angka pengemis dan gelandangan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta barat dalam mengatasi masalah pengemis dan gelandangan.

D. Kerangka Teori

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Menurut Mahsum dalam Masana (2012:81) “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*”. Menurut Bernardin dan Russel dalam Masana (2012:81) memberikan definisi tentang kinerja bahwa “ *performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*” yang memiliki pengertian bahwa kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Dwiyanto dalam Sudarmanto (2009:16) mengemukakan terdapat lima (v) indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu :

- a. Produktivitas, dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Kualitas layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
- c. Responsivitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas, menjelaskan atau mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders*.

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Gubernur serta Tugas Pembantuan.

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi DKI Jakarta secara instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat daerah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Masalah kesejahteraan sosial ini timbul karena tingkat kesejahteraan masyarakat turun yang diakibatkan oleh kemiskinan dalam hal ini yang menjadi pengaruh besar dalam masalah kesejahteraan sosial ini adalah tingginya tingkat urbanisasi yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Bintarto (1986:15) menyatakan bahwa urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu proses dalam artian:

- 1) Meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk kota. Kota menjadi lebih padat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, baik oleh hasil kenaikan fertilitas penghuni kota maupun karena adanya tambahan penduduk dari yang bermukim dan berkembang di kota.
- 2) Bertambahnya jumlah kota dalam suatu negara atau wilayah sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, budaya dan teknologi.
- 3) Berubahnya kehidupan desa atau suasana desa menjadi suasana kehidupan kota.

Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh berbagai faktor. Perkembangan daerah perkotaan melalui sektor industri dan perdagangan serta keinginan untuk memperoleh penghasilan merupakan faktor penyebab terjadinya urbanisasi. Proses urbanisasi terjadi akibat kebijakan dan peraturan di daerah perkotaan, terutama bidang ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah kota. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk terhadap kegiatan akan menyebabkan semakin besarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan daerah perkotaan (Firman 2005:3).

Tingginya tingkat urbanisasi di DKI Jakarta mengakibatkan timbul berbagai masalah salah satunya adalah masalah sosial yaitu masalah kesejahteraan sosial.

Menurut pandangan N. Efendi (2004:33) masalah sosial bersifat relatif, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Secara kualitatif masalah sosial adalah keadaan atau kejadian yang meresahkan masyarakat. Sedangkan secara kuantitatif masalah sosial adalah pelanggaran terhadap norma dan nilai yang meningkat terus jumlahnya secara konsisten dan signifikan. Contohnya: anak jalanan, kenakalan remaja, pelacuran, kriminalitas, pengangguran, pengemis, gelandangan, narkoba, kerusuhan sosial, mereka inilah yang disebut orang bermasalah atau orang yang berpredikat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, adalah orang perorangan, keluarga, dan atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami permasalahan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial. Oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintahan untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian kinerja suku dinas social dalam menekan angka pengemis dan gelandangan di kota administrasi Jakarta barat provinsi DKI Jakarta merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Desain penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan cresswel adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi yang berbeda dari penyelidikan yang mengeksplor masalah social dan manusia.³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan mendalam dengan informan yang dipilih, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan informan dari pihak suku dinas sosial, panti social, pengemis dan gelandangan serta berbagai pihak yang ikut terlibat dalam upaya menekan angka pengemis dan gelandangan di kota administrasi Jakarta barat. Untuk memperkuat data dokumentasi dan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung subyek dan obyek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini

³ cresswell, 2013. *Research design (pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

menggunakan metode analisi oleh Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah pengemis dan gelandangan dilihat dari kinerja suku dinas social kota administrasi Jakarta barat untuk menanggulangi tinggnya tingkat masalah kesejahteraan social di DKI Jakarta.

F. Hasil dan Pembahasan

Jumlah penduduk di daerah Jakarta Barat mencapai 2.281.945 jiwa naik sebesar 1,83% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatan mencapai 17,663.17 jiwa/km². Berkaitan dengan jumlah penduduk di kota administrasi Jakarta barat berdasarkan kecamatan dapat diamati bahwa pertumbuhan penduduk meningkat lebih cepat hal ini pun dapat mempengaruhi mengenai pekerjaan apa yang mereka lakukan terlihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014

NO	Uraian	2014
I	JUMLAH PENDUDUK	
	1. Penduduk WNI	
	a. Laki-Laki	1.161.837
	b. Perempuan	1.112.289
	2. Penduduk WNA	
	a. Laki-Laki	297
	b. Perempuan	259
	3. Kepadatan Penduduk/Km ²	185.412
II	Total Kepala Keluarga	701.673
III	Penduduk Pemegang KTP	1.622.021
IV	Pendatang Baru	30.117
V	Jumlah Kelahiran	37.001
VI	Jumlah Kematian	9.945

Sumber : Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan, dan dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan bahwa setiap manusia berhak mendapat Pendidikan dengan harapan untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dalam melangsungkan hidupnya.

Dalam hal pendidikan Jakarta barat sudah termasuk tingkat partisipasi Sekolah yang cukup baik dilihat dari tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Dari Tahun 2010 s/d 2014 Di Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Tahun	7 s/d 12 Tahun			13 s/d 15 Tahun			16 s/d 18 Tahun		
		LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah
1	2010 s/d 2014	116,009	110,075	226,084	28,005	27,008	55,013	8,045	6,709	14,754

Sumber : Sudin Pendidikan I Jakarta Barat

Dilihat dari tabel 4.2 tingkat partisipasi sekolah menurut usia sekolah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pada usia 13 sampai dengan 18 tahun cukup baik dalam hal ini dari data yang peneliti dapatkan di Panti sosial ternyata yang menjadi pengemis di jalanan rata-rata berusia 14 sampai dengan 16 Tahun. Sedangkan pada gelandangan berkisaran pada usia 18 tahun keatas.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu isu yang harus mendapat perhatian utama dari pemerintah. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur dari seberapa banyak angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di suatu wilayah. Adapun data PMKS di Kota Administrasi Jakarta Barat, dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6

**Data PMKS Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015
Setelah Pembentukan Tim P3S**

No	Data PMKS ABTB	Jumlah
1	Gelandangan	443
2	Pengemis	414
3	Wanita	34
4	Waria	27
5	Kusta	5
6	Psikotik/ODMK	266
7	Pengamen	272
8	Pemulung	23
9	P. Kotak Amal	13
10	Asongan	9
11	Joki Three In One	0
12	Pak Ogah	0
13	Tukang Pijit	0
14	Anak Jalanan	1
15	PMKS lainnya	253
Total		1780

Sumber: Program Prioritas Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat

Tahun 2016

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jakarta khususnya di Jakarta Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan masalah kesejahteraan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Disamping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Jakarta Barat masih banyak mengalami kesulitan, dimana semakin

kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial masih perlu dilanjutkan secara berkesinambungan dan peningkatan pelayanannya, hal ini dimaksudkan bahwa dalam penanganan pengemis dan gelandangan ini harus bersama dilakukan dengan Polri dan Pol PP yang harusnya mereka bekerja sama dalam menekan angka PMKS sendiri khususnya pengemis dan gelandangan. Sehingga jangkauan pelayanan dapat diperluas untuk mencapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan pada tahun 2016 ini.

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dapat digunakan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Atas dasar potensi ini Jakarta barat mencoba ,mengembangkan sistem jaminan sosial yang selektif untuk memenuhi kebutuhan dan hak sosial dasar semua penduduk melalui mekanisme APBD dimana jangkauannya masih terbatas. Hal ini dilihat peneliti bahwa dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan penduduk yang ada di sekitar daerah Jakarta Barat berdasarkan observasi dan hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan sosial bahwa program ini dilakukan setiap 1 tahun sekali yang bernama UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bagi keluarga miskin dimana bantuan stimulan ini berupa uang untuk dana APBN dan berupa barang untuk dana APBD. Dalam hal ini peneliti akan bercerita sedikit mengenai KUBE dan UEP yang diprogramkan oleh Dinas Sosial melalui Sudin Sosial dimana dana ini diberikan untuk membantu keluarga miskin yang memiliki keterampilan atau memiliki kemauan untuk merubah status hidupnya. Program ini dijalankan pada masyarakat yang produktif. Sehingga untuk timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya di Jakarta Barat dapat dipastikan berkurang secara signifikan di tahun 2016 nantinya.

Payung hukum yang lemah dalam penanganan pengemis dan gelandangan ini mengakibatkan permasalahan pengemis dan gelandangan di DKI Jakarta tidak akan ada habisnya. Setiap tahunnya atau setiap bulannya mereka selalu bertambah jumlahnya dengan orang yang berbeda. Pada dasarnya landasan hukum yang dibuat seperti PP Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan, Peraturan Gubernur No 169 tahun 2014 tentang pola penanganan PMKS dan Perda 8 tahun 2007

tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta yang mengatur penanganan Pengemis dan Gelandangan sudah sangat jelas, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar atau maksimal. Hal ini dilihat dari kerjasama antar instansi terkait, kontroling dari masyarakat dan juga dari kesadaran masyarakat (pengemis dan gelandangan) itu sendiri.

Pada dasarnya kenapa masalah kesejahteraan sosial yang mengakibatkan timbulnya pengemis dan gelandangan ini tidak ada habisnya karena faktor utama dari ekonomi, kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan kesadaran dari masyarakat yang lemah serta pengawasan yang belum optimal. Ketika peraturan ini dijalankan maka sangat dibutuhkan kerjasama masyarakat selain juga kerjasama antar instansi.

Untuk mengatasi masalah pengemis dan gelandangan Suku dinas sosial memiliki program yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengurangi angka kemiskinan di Jakarta barat sendiri. Program ini ada yang berasal dari dana APBN dan APBD. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana dilaksanakan oleh Bagian Pemberdayaan sosial bahwa program ini dilakukan setiap 1 tahun sekali yang bernama UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bagi keluarga miskin dimana bantuan stimulan ini berupa uang untuk dana APBN dan berupa barang untuk dana APBD. Mengenai KUBE dan UEP yang diprogramkan oleh Dinas Sosial melalui Sudin Sosial dimana dana ini diberikan untuk membantu keluarga miskin yang memiliki keterampilan atau memiliki kemauan untuk merubah status hidupnya. Program ini dijalankan pada masyarakat yang produktif.

Kemudian di Bagian Rehabilitasi sosial, yaitu pemberian pelayanan kepada pengemis dan gelandangan yang dibantu oleh Tim P3S (Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial) dimana bagian rehabilitasi sosial ini bertuga untuk mengantarkan pengemis dan gelandangan ini ke jalan yang benar dengan melakukan rehab di panti sosial. Pada saat di panti sosial ini pengemis dan gelandangan diberikan pelatihan dan penyuluhan untuk melatih dan membina mereka menjadi masyarakat yang produktif.

Dalam hal ini program yang sudah dirumuskan dalam rencana strategis oleh Dinas Sosial yang Dilaksanakan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sudahlah berjalan dengan semestinya. Dilihat dari Suku Dinas Sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan, hanya saja kesadaran dari masyarakat

sendiri serta masih adanya ego instansi mengakibatkan permasalahan kesejahteraan sosial seperti pengemis dan gelandangan ini masih belum terselesaikan.

Apabila kita membahas mengenai kinerja suatu organisasi maka sesuai yang diungkapkan oleh dwiyanto bahwa kinerja itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya, dari pernyataan diatas terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja birokrasi publik diantaranya, produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Maka dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan kinerja Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat dapat diamati sebagai berikut :

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tentang efisiensi saja tetapi juga efektivitas pelayanan. Pada pencapaiannya terdapat rasio input dengan output. Dalam hal ini dilihat dari seberapa besar pelayanan yang diberikan sudin sosial itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja yang penting.

Dari data yang penulis dapatkan diatas pada hasil wawancara dengan Bapak Surya A, SE, MSi selaku kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat dapat diinterpretasikan bahwa produktivitas yang ada di sudin sosial sudah berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari kerjasama aparatur dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tupoksinya terkait menekan angka pengemis dan gelandangan yang ada di Jakarta barat. Kemudian dilihat dari pencapaian hasil tujuan, pada dasarnya aparatur sudah menjalankan tupoksinya dengan baik tapi pada dasarnya pencapaian tujuan untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial ini tidak kunjung selesai. Sehingga dilihat dari produktivitas sudin sosial sudah dapat dikatakan berjalan dengan semestinya.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, hal ini dilihat dari kemudahan dan kejelasan informasi, standar pelayanan yang jelas dan tingkat kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik, dimana Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali bisa menjadi suatu ukuran kinerja yang murah dan mudah dipergunakan.

Hal ini dapat dikaitkan antara pernyataan diatas dari hasil wawancara dengan bapak Henri selaku kepala seksi bidang rehabilitasi sosial, dimana dalam hal ini anggota mereka dibantu oleh Tim P3S dalam penjangkauan pengemis dan gelandangan yang ada di jalanan. Dan kemudian juga mereka mensosialisasikan tentang perda no 8 tahun 2007 mengenai pelarangan bagi yang memberi dan menerima atau dengan kata lain meminta-minta di jalanan. Dalam hal ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai larangan tersebut dan juga hal ini sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan. Dalam mengatasi kerentanan masyarakat terhadap penggelandang dan pengemis, maka mereka diberikan pelayanan yang maksimal di Panti sosial sesuai dengan standar pelayanan yang jelas.

3. Responsivitas

Responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Hal ini tentunya dapat diukur dengan daya tanggap aparat dan kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat.

Dari data yang penulis dapatkan di lapangan dan dari hasil wawancara dengan Bapak Surya A, SE, MSi selaku kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa untuk mengetahui pencapaian hasil kerja maka selalu dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan sudin sosial dapat menyentuh masalah kesejahteraan sosial pada masyarakat. Hal ini tentunya berdasarkan dari permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat, terkhusus pada masalah pengemis dan gelandangan yang masih belum teratasi. Pada dasarnya sudin sosial sudah melakukan dan menyelenggarakan program-program unggulan seperti Bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin, penjangkauan pengemis dan gelandangan setiap hari, pembentukan Tim P3S dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengemis dan gelandangan yang ada di jalanan serta penyaluran ke panti sosial. Hanya saja sarana dan prasarana yang terbatas baik dalam penjangkauan maupun dalam penampungan pengemis dan gelandangan ini mengakibatkan kinerja sudin sosial kurang optimal.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan tentang apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang bersifat eksplisit maupun yang bersifat implisit. Kemudian hal ini dapat diukur dengan ketaatan aparatur terhadap aturan dan kesesuaian antara program dan prosedur yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal di atas dari data dan pengamatan yang terjadi dilapangan serta dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuni Purwaningsih selaku kepala tata usaha Sudin Sosial bahwa dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur sudah sangat baik dilihat dari setiap pelaksanaan program yang tepat waktu dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Kemudian ketaatan aparatur terhadap aturan dilihat dari disiplin pegawai dan ketepatan tupoksi yang mereka laksanakan, dan tidak melakukan insubordinasi kepada atasan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi apabila kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Akuntabilitas ini dapat diukur dengan pertanggungjawaban aparatur, keteguhan aturan dan control masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Irfan Jauhari selaku kepala bidang administrasi Dinas sosial dan Bapak Surya A, SE, MSi selaku kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sudin sosial kota administrasi Jakarta barat berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan juga laporan pertanggung jawabannyapun lengkap yang dikirimkan setiap tahunnya oleh sudin Jakarta barat tentunya hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sudin sosial sudah berjalan dengan optimal hanya saja kegiatan ini kurang efektif dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas seiring dengan perkembangan masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks yang ada di masyarakat.

Hambatan yang Dihadapi Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis dan Gelandangan di Kota Administrasi Jakarta Barat

Dari data yang diperoleh, hasil wawancara dengan Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Surya A, SE, MSi dan dari pengamatan penulis di lapangan ditemukan bahwa ada beberapa faktor penghambat ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Suku Dinas Sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan yang ada di Jakarta Barat antara lain :

1. Sarana dan Prasarana atau fasilitas
 - a. Sarana dan prasarana yang ada di suku dinas sosial kota administrasi Jakarta barat terbatas hal ini dilihat dari fasilitas kantor yang sebagian sudah rusak dan tidak layak pakai dalam mendukung kinerja aparturnya.
 - b. Kemudian dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di panti sosial yang menjadi tanggung jawab dinas sosial masih sangat terbatas seiring dengan perkembangan masalah pengemis dan gelandangan yang ada di jalanan.
 - c. Kurangnya tenaga penyuluhan yang ada di Panti Sosial mengakibatkan kurang efektifnya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan untuk tahap rehabilitasi pengemis dan gelandangan di panti sosial
 - d. Terbatasnya kapasitas penampungan bagi pengemis dan gelandangan di panti sosial hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah dari peserta pengemis dan gelandangan setiap bulannya.
 - e. Akomodasi Sudin sosial yang terbatas hal ini dikarenakan sudin sosial hanya memiliki 1 mobil patrol yang ada untuk penjangkauan pengemis dan gelandangan di mana mobil ini sudah banyak terkena eksploitasi oleh anak jalanan yang ada saat patrol.
2. Sumberdaya aparatur
 - a. Kurangnya koordinasi antar dinas sehingga masih berkembangnya masalah pengemis dan gelandangan.
 - b. Kurangnya personil dalam penanganan pengemis dan gelandangan yang ada di panti Sosial hal ini dapat dilihat dari alat kelengkapan, suasana yang tidak efektif, serta jumlah pengemis dan gelandangan yang berkembang seiring berjalannya waktu dengan tempat yang terbatas,

tenaga yang terbatas dengan penambahan Pengemis dan gelandangan yg terus subur.

- c. Adanya ego sektoral dalam penanganan pengemis dan gelandangan yang ada dijalanan hal ini dapat dilihat dari penertiban peraturan daerah no 8 tahun 2007 yang seharusnya dilakukan oleh satpol PP.
3. Terbatasnya wewenang dari sudin sosial dalam pengawasan sehingga tidak adanya pengawasan langsung bagi pengemis dan gelandangan dalam tindak lanjut untuk menekan angka pengemis dan gelandangan.
 4. Payung hukum yang lemah
 - a. Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan sudah maksimal hanya saja masih banyak oknum-oknum yang kurang peduli terhadap sanksi yang diberikan sehingga penyakit mengemis dan menggelandang merajalela.
 - b. Kurangnya perhatian dari lembaga atau dinas terkait terhadap penegakan hukum khususnya yang bertugas dalam penegakan peraturan.
 - c. Masih belum maksimalnya penegasan terhadap hukuman yang diterima bagi pengemis dan penggelandang,

Upaya yang Dilakukan Dalam Menekan Angka Pengemis dan Gelandangan

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial khususnya penanganan pengemis dan gelandangan ini adalah mentalitas seseorang. Mentalitas ini didapat dari pendidikan pertama yaitu keluarga dan lingkungan. Dimana hal ini dilihat juga dari keluarganya, sebenarnya mentalitas Indonesia ini seperti alkisah dongeng yang mana mereka ingin instan dalam mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini balik lagi ke pendidikan mereka, bagaimana pendidikan mereka di keluarga, di lingkungan dan di ranah pendidikan seperti sekolah. Jadi hal ini saling keterkaitan dimana hal yg utama adalah dari keluarga, ketika keluarga sudah, kemudian lingkungan tidak baik maka tetap saja akan menimbulkan mental yang kurang baik. Dan kemudian dalam hal ini bangsa Indonesia sudah mendasar dengan budaya konsumtif, sebenarnya bukan biaya hidup yang mahal tapi gaya hidup mereka. Dalam hal ini mengapa mereka pengemis dan gelandangan tetapi rumah mereka di daerah sana gedungan, ya balik lagi ke gaya hidupnya. Untuk mengatasi hal ini harusnya pemerintah dan juga masyarakat menggalakan stop memberi di jalanan, hal ini dapat membuat si pengemis dan gelandangan dapat kewalahan ketika kita semua

sepakat khususnya warga DKI Jakarta bahwa dilarang memberi uang di jalanan dan dilarang membuka kaca mobil ketika dikotok serta dilarang memberikan sumbangan liar kepada si pengemis dan gelandangan. Sehingga dapat digalakan dari “Peminta menjadi Pekerja”. Hal ini dilihat bukan hanya dari hukum saja, tapi dari pengemis dan gelandangan ini juga.

Dan hal ini dapat berkurang ketika pembinaan dilakukan secara tuntas di Panti sosial tentunya juga dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dilihat dari keefektifan peserta dalam mendengarkan dan memperhatikan penyuluhan serta tingkat pembinaan dan pelatihan yang ekstra untuk mendapatkan hasil yang baik dalam hal ini dilihat bukan hanya memberikan penyuluhan dalam jangka waktu 1-6 bulan tetapi secara tuntas sehingga mereka benar-benar tidak melakukannya lagi dan setelah yg di bina ini kembali kejalan yang benar maka, dia juga dapat memberikan bimbingan terhadap pengemis dan gelandang yang baru didalam panti. Hal ini juga dapat dilihat pada Panti Sosial yang ada di Bogor dalam penanganan Narkoba. Dimana dalam hal ini dilihat dari kapasitas penampungan di panti dimana panti yg besar disini harusnya itu hanya muat untuk 80 orang agar efektif tetapi kenyataannya bisa sampai menampung 200 orang lebih tapi balik lagi dengan penambahan jumlah Pengemis dan Gelandangan yang terus bertambah mengakibatkan hal ini terjadi. Kemudian adanya kesinergian dan koordinasi dari dinsos, disnaker dan dinas pendidikan dalam penanganan hal ini.

Kemudian adanya pengawasan langsung dari Suku Dinas Sosial dalam menekan angka pengemis dan gelandangan hal ini dilansir bahwasanya setelah pengemis dan gelandangan keluar dari panti sosial mereka balik lagi menjadi pengemis dan gelandangan. Diberikannya kewenangan kepada sudin sosial untuk melakukan pengawasan langsung terkait penanganan lebih lanjut bagi pengemis dan gelandangan, tentu saja hal ini harus sejalan dengan tugas dan fungsi dari suku dinas sosial tersebut, dalam rangka tercapainya tujuan dari dinas sosial yaitu menyelesaikan masalah sosial yang salah satunya adalah pengemis dan gelandangan.

Dengan demikian diharapkan bagi masyarakat, pemda, maupun para pemerhati untuk merenungkan lagi hal yang akan dilakukan karna media saja dapat menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pengemis dan gelandangan hal ini dilihat dari pemberitaan yang ada di TV dimana setiap kali penangkapan pengemis dan gelandangan mereka

selalu meng-ekspose mengenai uang yang diperoleh oleh mereka hingga puluhan juta hal ini mengakibatkan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tertarik untuk datang kejakarta.

G. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kinerja suku dinas social dalam menekan angka pengemis dan gelandangan belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari angka pengemis dan gelandangan yang terus bertambah dikarenakan dimensi kinerja belum sepenuhnya tercapai seperti produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis jabarkan diatas tentang Kinerja Suku Dinas Sosial Dalam Menekan Angka Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Kinerja Suku Dinas Sosial Kota administrasi Jakarta barat agar diberikan kewenangan untuk mengawasi langsung bagi pengemis dan gelandangan yang telah selesai melaksanakan pelatihan dan bimbingan di panti sosial.
2. Hambatan yang dihadapi
 - a. Peningkatan pengawasan terhadap Pengemis dan gelandangan baik itu yang ada dijalanan maupun yang setelah keluar dari panti sosial
 - b. Penegasan terhadap hukum yang telah diberlakukan terhadap pelanggar, dalam hal ini agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
 - c. Peningkatan pelatihan dan pembinaan agar lebih efektif bagi pengemis dan gelandangan yang ada di panti sosial. Hal ini dilihat dari kesiapan mereka untuk menjadi lebih produktif.
 - d. Peningkatan sumberdaya yang berkualitas dalam hal ini memiliki kompetensi yang tinggi untuk melatih dan membina pengemis dan gelandangan yang ada di Panti sosial.

- e. Perlu adanya perbaikan infrastruktur baik di kantor Suku Dinas sosial Kota Administrasi Jakarta barat maupun di panti sosial.
3. Upaya yang perlu ditingkatkan
- a. Pembuatan inovasi baru terkait sosialisasi perda no 8 tahun 2007 mengenai ketertiban umum yang didalamnya mengatur sanksi bagi pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di jalanan serta bagi pemberi.
 - b. Menjalinkan kerjasama yang baik antar instansi terkait baik itu dinas ketenagakerjaan, polisi, satpol PP maupun dinas kependudukan dan catatan sipil.
 - c. Meningkatkan program bagi keluarga miskin yang produktif, serta melakukan pengawasan langsung terhadap keluarga miskin yang masih tergolong miskin setelah diberikan program bantuan seperti UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk mengurangi presentasi dari pengemis dan gelandangan yang ada di jalanan